



Dominasi Oligarki dalam Demokrasi Indonesia Membuat Pelemahan KPK Tak Terhindarkan

Abdil Mughis Mudhoffir dan Vedi R. Hadiz

© Watch Indonesia!

Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi, 2014 – sekarang), pengekan terhadap kebebasan berpendapat serta pelemahan dan pembajakan institusi hukum dan demokrasi di Indonesia semakin memburuk. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – simbol capaian Reformasi yang paling menonjol – juga telah diperlemah demi kepentingan aliansi-aliansi bisnis dan politik-birokratis yang melekat pada struktur oligarki yang mendominasi kehidupan bernegara.

Berbagai studi memandangkan gejala ini sebagai indikator kemunduran proses demokratisasi di Indonesia, setelah sebelumnya mengalami stagnasi sejak 2010 (Warburton dan Aspinall 2019; Mietzner 2018; Power dan Warburton 2020; Fossati et al. 2021). Kemunduran ini menurut studi-studi yang didominasi pandangan pluralisme liberal itu disebabkan oleh kecenderungan elite politik yang semakin menjauhi agenda Reformasi 1998 di satu sisi serta menguatnya polarisasi sosial karena adanya ancaman populisme Islam di sisi lain.

Menurut kami, argumen bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran seperti itu adalah problematik karena bersandar pada paradigma ‘transisi demokrasi’ yang mengandaikan bahwa sebelumnya proses demokratisasi sempat terkonsolidasi dalam bentuk yang mengarah kepada model yang liberal. Penopang demokrasi Indonesia menurut paradigma ini terletak pada kebertahanan masyarakat sipil dalam mengimbangi kekuatan anti-demokrasi (Mietzner 2021). Kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden tahun 2014, bagi mereka, adalah bukti kekuatan masyarakat sipil penopang demokrasi di satu sisi serta kelemahan oligarki di sisi lain (Mietzner 2015; Aspinall and Mietzner 2014). Persoalannya: sebenarnya oligarki dan demokrasi tidak harus bertentangan; bahkan keduanya bisa saling menunjang dalam suatu model demokrasi yang bersifat illiberal.

Pandangan pluralisme liberal yang cenderung menilai demokrasi di Indonesia secara kurang kritis agak menyedihkan karena bertendensi kurang mempersoalkan struktur ekonomi-politik di Indonesia yang lebih mendasar. Pandangan seperti ini menutup mata pada sifat illiberal demokrasi di Indonesia dan menjelaskan penyimpangan terhadap harapan-harapan pluralis-liberal hanya dari segi perilaku aktor-aktor politik tertentu. Namun aktor-aktor tersebut, pada kenyataannya, bekerja dalam suatu konstelasi kekuasaan ekonomi-politik yang tidak banyak mengalami perubahan fundamental dibandingkan pada periode otoriter. Hal ini dimungkinkan walaupun politik Indonesia amat diwarnai kontestasi politik elektoral yang sering hingar bingar. Institusi hukum dan demokrasi yang baru tidak dapat menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak sosial ekonomi warga secara menyeluruh karena didominasi dan diarahkan oleh kepentingan oligarki. Dalam beberapa tahun terakhir, pembajakan institusi-institusi ini oleh oligarki untuk melayani kepentingan akumulasi kekayaan dan kekuasaan terjadi secara semakin gamblang.

Oligarki sebagai Pengorganisasian Kekuasaan Ekonomi-Politik

Bersandar dari pandangan Robison dan Hadiz (2004), kami mendefinisikan oligarki sebagai suatu bentuk pengorganisasian kekuasaan yang ditandai oleh fusi antara kekuatan ekonomi dan politik dalam menjalankan proses akumulasi kekayaan dan otoritas dan upaya pertahanan kolektifnya. Pengertian ini berbeda dari definisi yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters (2011) yang lebih menekankan pada segi aktor, sebagaimana konglomerat super kaya dapat mempengaruhi kebijakan politik, atau dari pandangan Aristotelian yang memaknai oligarki sebatas pemerintahan oleh orang kaya yang jumlahnya terbatas.

Dengan menekankan pada bentuk pengorganisasian kekuasaan ekonomi-politik, kami memaknai oligarki lebih dalam kerangka struktural. Artinya, dominannya bentuk pengorganisasian kekuasaan yang oligarkis ini bukan karena kemampuan kaum kaya-raja dalam menentukan kebijakan politik, melainkan karena mengemukanya fusi kekuatan ekonomi-politik yang membuat kepentingan akumulasi kekayaan dan kekuasaan begitu menonjol dalam menentukan beroperasinya institusi-institusi publik.

Fusi kekuatan ekonomi-politik ini terbentuk karena corak akumulasi kapital yang sangat bergantung pada akses dan kontrol terhadap institusi publik serta proteksi dari negara. Ia terkonsolidasi di bawah pemerintahan Suharto yang otoriter yang memfasilitasi lahirnya kelas kapitalis baru terutama dari kalangan Tionghoa, dalam aliansi dengan kelompok-kelompok politik-birokratis, sebagai respons atas kebangkrutan perusahaan-perusahaan milik negara yang semula menjadi medium utama akumulasi kapital. Karena keterbatasan kultural akibat diskriminasi rasial, pengusaha Tionghoa tidak dapat mengonversi kapitalnya untuk membangun otonomi relatif dari negara sebagaimana pengalaman kelas kapitalis yang baru tumbuh di Inggris pada abad ke-18. Kondisi ini memaksa kelas kapitalis Indonesia untuk mencari proteksi serta akses atas lisensi maupun kontrak-kontrak usaha, sehingga mengokohkan aliansi-aliansi bisnis-politik yang bersifat predatoris – yakni mendayagunakan kontrol terhadap institusi-institusi publik untuk keperluan akumulasi privat.

Meskipun rezim politik telah berubah menjadi demokratis, bentuk pengorganisasi kekuasaan ekonomi-politik itu tetap bertahan. Ini dimungkinkan karena proyek demokratisasi dimajukan secara beriringan dengan tekanan neoliberalisme – yang menghendaki berkurangnya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi – ketimbang sebagai hasil desakan dari kekuatan-kekuatan sosial progresif yang terkonsolidasi. Sejak pembantaian komunis tahun 1965/1966, secara relatif tidak ada kelompok sosial semacam itu, sebagai konsekuensi proyek demobilisasi dan kontrol politik Orde Baru yang juga amat membatasi perkembangan basis sosial untuk tradisi-tradisi politik liberal atau sosial-demokrat.

Selain terselenggaranya pemilihan umum yang relatif bebas dan kompetitif, demokrasi pada akhirnya lebih ditandai oleh kehadiran institusi-institusi baru ketimbang inklusivisme politik yang substantif. Namun, institusi-institusi ini tidak berada dalam ruang hampa. Mereka beroperasi dalam suatu ekosistem yang didominasi oleh hubungan-hubungan kekuasaan yang oligarkis, sementara kekuatan sosial-politik progresif yang diharapkan dapat menopangnya relatif lemah. Akibatnya, lembaga-lembaga hukum dan demokrasi yang terbentuk bukan hanya tidak dapat membatasi pengaruh kekuasaan oligarki, melainkan justru menjadi wahana baru untuk memfasilitasi kepentingan akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Contohnya adalah program desentralisasi yang menyumbang pada munculnya ‘raja-raja kecil’ daerah yang tidak peduli dengan tata kelola pemerintahan teknokratis yang, dalam konsep, menyertainya. Selain itu, kegagalan KPK dalam mengatasi persoalan korupsi yang kronis serta keberhasilan aliansi bisnis-politik mer-

ekayasa lembaga ini untuk tujuan yang amat berbeda mengilustrasikan dengan jelas kecenderungan di atas.

Pelemahan KPK dan Kegagalan Reformasi Institusional

Saat pengorganisasian kekuasaan bersandar pada fusi kekuatan ekonomi dan politik, korupsi secara inheren menjadi bagian penting dari proses akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Bahkan sebelum KPK dilemahkan, kehadiran lembaga ini tak mampu menjadi penentang pengorganisasian kekuasaan oligarkis dalam cara yang mendasar. Kewenangan yang besar dalam melakukan penyadapan memang membuat KPK berhasil melakukan banyak operasi tangkap tangan yang menjerat pejabat negara, politisi dan pengusaha. Akan tetapi, banyak skandal mega korupsi yang melibatkan aktor-aktor di pusat kekuasaan, seperti kasus dana bantuan BLBI dan Bank Century, tak terjamah. Korupsi tetap endemis dan ruang bagi elemen-elemen penopang organisasi kekuasaan yang oligarkis tetap terbuka lebar.

Pada kenyataannya, KPK memang sejak awal telah memiliki beberapa keterbatasan mendasar yang menghambat upaya pemberantasan korupsi. Banyak staf dan penyidik komisi ini, misalnya, direkrut dari instansi kepolisian dan kejaksaan, lembaga penegak hukum yang mempunyai sejarah korupsi yang panjang. Kewenangan memilih pimpinan KPK, sebagaimana juga pimpinan lembaga penegak hukum lainnya, juga terdapat pada lembaga eksekutif dan legislatif yang didominasi oleh kepentingan oligarki. Di samping itu, KPK juga sejak awal sangat bergantung pada perlindungan yang diberikan oleh presiden ketika menghadapi serangan dari koruptor. Dasar hukum yang menjadi acuan pembentukan lembaga anti-korupsi itu juga sangat rentan diubah demi kepentingan aliansi bisnis-politik yang predatoris. Dengan kata lain, keberadaan KPK sudah terancam sejak kelahirannya.

Tidak mengejutkan, serangan-serangan terhadap institusi, pimpinan maupun penyidik KPK telah terjadi sejak awal lembaga ini bekerja. Yang paling monumental adalah serial serangan bertajuk ‘cecak versus buaya’ yang dilancarkan oleh beberapa petinggi polisi dalam proses penyidikan kasus korupsi di lembaga kepolisian. Upaya melakukan revisi Undang-Undang tentang KPK untuk semakin memperlemah lembaga ini juga telah dilakukan beberapa kali. Namun, baru pada era Jokowi, aliansi bisnis-politik sukses memastikan pelemahan KPK – lembaga yang terlepas dari segala kelemahannya tetapi menjadi simbol reformasi yang penting. Ini dimungkinkan terutama karena keberhasilan aliansi bisnis-politik di lingkungan pemerintahan Jokowi dalam mengeksploitasi menguatnya mobilisasi politik identitas serta adanya kooptasi elemen-elemen masyarakat sipil yang turut menjustifikasi pelemahan KPK. Sebagaimana diketahui, isu ‘talibanisasi’ KPK digulirkan sebagai bagian upaya untuk menyudutkannya dengan cara mengaitkan banyak penyidiknya dengan haluan politik Islam garis keras yang ‘anti-Pancasila’.

Dengan kata lain, kasus pelemahan KPK menggambarkan kegagalan reformasi yang selama ini bertumpu pada pembentukan institusi maupun desain kebijakan baru. Alih-alih mampu membatasi dominasi oligarki, institusi-institusi baru itu tetap rentan menjadi mainan kepentingan oligarki.

Kesimpulan

Kasus pelemahan KPK serta semakin memburuknya perlindungan terhadap hak sipil dan politik warga dalam beberapa tahun terakhir merupakan konsekuensi atas kecenderungan watak predatoris dalam demokrasi di Indonesia akibat dominasi hubungan-hubungan kekuasaan yang oligarkis. Dominasi oligarki dimungkinkan di antaranya karena lemahnya kekuatan sosial progresif yang dapat memberikan tantangan yang berarti kepada aliansi bisnis-politik. Artinya, kasus pelemahan KPK bukan gejala kemunduran demokrasi sebagaimana diyakini kalangan pluralis liberal, melainkan indikator penting bahwa konstelasi kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia masih tidak menopang model demokrasi yang

diimpikan dalam paradigma transisi demokrasi yang masih kondang dan berpengaruh.

Abdil Mughis Mudhoffir adalah *honorary fellow* di Asia Institute, University of Melbourne dan dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Ia adalah penulis buku *State of Disorder: Privatised Violence and the State in Indonesia* (Palgrave Macmillan, 2021).

Vedi R. Hadiz adalah Direktur dan Guru Besar Kajian Asia pada Asia Institute, University of Melbourne. Ia menulis buku, antara lain, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge University Press 2016) dan, bersama Richard Robison, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (Routledge, 2004).